



Pejabat Kemenkeu Datang

## Askiman Sampaikan Usulan Pembangunan



**DIABADIKAN.** Wabup Sintang Askiman (enam dari kiri) dan Anggota DPR RI Dapil Kalbar Sukiman (tujuh dari kiri) berfoto bersama rombongan Kementerian Keuangan RI di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (21/2). **HUMAS PEMKAB SINTANG FOR RK**

**SINTANG-RK.** Wakil Bupati Sintang, Askiman, menerima kunjungan Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Sukiman, Kamis (21/2). Dalam kesempatan itu, Wabup mengekspose kegiatan pembangunan di Sintang.

Askiman menjelaskan, Sintang termasuk kabupaten tertua namun masuk dalam kategori terpencil dan tertinggal. Untuk itu, diperlukan dukungan dan bantuan dari Anggota DPR dan pemerintah pusat untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur.

"Saat ini, penduduk Kabupaten Sintang mencapai 403 ribu jiwa. Tantangan pembangunan di Kabupaten Sintang adalah mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur," tuturnya, menyampaikan sambutan di Pendopo Bupati Sintang.

Pemkab Sintang, dipaparkan Askiman, secara perlahan-lahan mengurangi persentase jalan rusak. Tantangan mengentaskan kemiskinan juga sangat tinggi karena berkorelasi dengan perbaikan infrastruktur tersebut.

"Hal lainnya adalah, mayoritas masyarakat kami mengandalkan karet dan sawit yang saat ini harganya tidak stabil. Sedangkan masyarakat di perbatasan kebanyakan menjadi petani lada. Karena jalan di perbatasan menuju Kota Sintang rusak, maka kebanyakan petani kita menjual lada ke Malaysia," paparnya.

Petani juga banyak membeli pupuk lada ke Sarawak yang ternyata sudah dicampur dengan virus sehingga akhirnya banyak lada petani yang mati," terang Wabup.

Ada juga kondisi pendidikan di Sintang yang gedung sekolahnya memprihatinkan. Selain itu, banyak usulan yang sudah disampaikan namun belum berhasil direalisasikan pemerintah pusat. Padahal, Pemkab Sintang sudah lima tahun berturut turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, namun tidak mendapatkan dana insentif daerah. "Kami sadar ada persyaratan untuk mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Tetapi kami mohon bantuan dari





pemerintah pusat. Mohon bimbingan supaya kami bisa memperbaiki diri dan kemudian mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat," ungkap Askiman.

Askiman juga menjelaskan usulan pembangunan yang direncanakan tahun 2019 yang diharapkan pembiayaan dari pemerintah pusat. "Serta berterima kasih sejak 2017-2018 sudah ada bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Sintang," ujarnya.

Sukiman datang bersama Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kemkeu RI Putut Hari Satyaka, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar Sahat Pangabean, Kabag Hukum dan Ortala Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dwi Rudy Hartoyo, serta Kepala KPPN Sintang Ina Zaleha.

Putut Hari Satyaka menjelaskan, sudah menyimak curhat Wakil Bupati Sintang tadi. Daftar kebutuhan Kabupaten Sintang juga sudah pihaknya rekam. "Kami mengapresiasi semua ini dengan kondisi Kabupaten Sintang yang masih mengalami masalah infrastruktur dasar," ucapnya.

Soal dana insentif daerah, memang 2017 ada DID alokasi dasar. Syaratnya mendapatkan opini WTP dan pengesahan APBD tepat waktu, pasti mendapatkan DID Rp7,5 miliar. DID juga ada dalam 10 kategori, na-

mun memang setiap daerah harus memenuhi syarat yang agak berat. "Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak bisa mendapatkan dana tersebut. Kalau daerah tersebut tidak mampu berada diatas passing grade, maka tidak mendapatkan dana insentif," terang Putut.

Saat ini pihaknya mengambil kebijakan penilaian daerah berdasarkan 10 kategori seperti pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, perencanaan terbaik, inovasi terbaik, penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dan ternyata Kabupaten Sintang ada dua kategori yang nilainya B yakni pada kategori pengelolaan keuangan daerah dan bidang kesehatan saja yang lain nilainya C.

"Namun, dua kategori itu hanya 59 sementara standarnya 61 jadi belum juga memenuhi syarat mendapatkan dana DID. Ada daerah yang mendapatkan dana insentif mencapai 70 miliar. DID ini untuk memacu daerah meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik," tutur Putut.

Mengenai dana alokasi khusus terdapat tiga saringan untuk seleksi usulan daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga memang setiap usulan daerah betul-betul dilihat dengan cermat oleh pemerintah pusat. Untuk usulan

dana alokasi khusus tahun anggaran 2019, pada awal Maret nanti sudah keluar prosedur pengusulan.

"Silakan siapkan proposal dengan baik dengan dilengkapi data dan informasi yang akurat ditambah dengan koordinasi yang baik dengan kementerian teknis. Soal ruangan kelas yang rusak, kami sudah punya data. Di seluruh Indonesia memerlukan dana sekitar 50 triliun untuk memperbaiki ruang kelas saja," terang Putut.

Sementara H. Sukiman menyampaikan, sangat memahami usulan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai salah satu kabupaten tertua dengan berbagai potensi wisata sejarah, maka sintang ini baik dikembangkan wisata lebih baik lagi kedepannya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sintang memang harus ada peningkatan perbaikan kualitas jalan supaya hasil pertanian dan perkebunan bisa dijual dan mampu mendorong ekonomi masyarakat. "Saya selalu menyampaikan kebutuhan masyarakat Kalbar ini saat rapat rapat internal DPR maupun saat rapat DPR dengan pemerintah pusat. Sintang ini tidak akan saya biarkan. Kami akan perjuangkan aspirasi rakyat yang kami wakili," tegas Sukiman. (Humas Pemkab Sintang)